

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada penelitian terdahulu oleh :

1. Hariati Adawiyah (2023) yang berjudul “Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan dalam Pembuatan Surat Pindah Datang”. Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data diambil secara *Porpositive Sampling* berjumlah 12 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan dalam Pembuatan Surat Pindah Datang sudah baik hal ini dapat dilihat dari indikator yang *pertama*, Kemampuan selektif cukup baik karena banyaknya pembuatan surat yang sesuai dengan identitas lainnya seperti KK dan KTP hanya 1 atau 2 yang mengalami kesalahan, sosialisasi sudah baik tentang persyaratan pembuatan surat pindah datang sudah baik hal ini dapat dilihat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan terlibat aktif dalam penempelan poster persyaratan pembuatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, *kedua* tingkat keabsahan (*legitimacy*) adalah baik sesuai dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 85 Tahun 2021, Penerapan inovasi cukup baik berinovasi melalui aplikasi Galuh Sanggam atau website http://disdukcapil_balangan.go.id dan melalui chat WA 0875 1849 1580.

Ketiga, pengetahuan sudah baik dilihat dari pegawai yang mengikuti pelatihan-pelatihan mengenai pembuatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, kemahiran manajerial sudah baik, dilihat dari koordinasi pemerintah desa yang terlibat dalam pembuatan surat pindah datang. *Keempat* Kinerja Dinas kurang baik terlambatnya penyelesaian surat pindah datang yang tidak selesai dalam 1 jam, kedisiplinan kurang baik ada beberapa orang pegawai yang tidak disiplin dalam bekerja. *Kelima*, peran sebagai pelaksana sudah baik sesuai dengan acuan pada yang ada. Faktor-faktor yang menghambat Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan dalam Pembuatan Surat pindah datang adalah kurangnya jumlah petugas dalam pembuatan surat, kurangnya kedisiplinan dan Jaringan Internet yang kadang tidak stabil. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi penghambat adalah melakukan pembatasan antrian, menindak pegawai tidak disiplin dan Pengadaan jaringan *wifi* khusus. Sebagai usaha mencapai Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan dalam Pembuatan Surat Pindah datang ini dengan cara meningkatkan ketelitian petugas pembuatan surat pindah datang, memberikan kepastian waktu dalam pemrosesan pada pembuatan surat pindah datang lebih diperjelas dan dipertegas ketika ada kendala koneksi jaringan.

2. Nita Bonita (2016), dengan judul Peran “Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Meningkatkan Kunjungan Wisatawan Labuan Cermin di Kabupaten Berau” yang dipublikasikan dalam eJurnal Ilmu Pemerintahan Volume 4, Nomor 4 Hal 1499-1510. Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam meningkatkan Kunjungan Wisatawan Labuan Cermin di Kabupaten Berau. Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam meningkatkan kunjungan wisatawan Labuan Cermin di Kabupaten Berau masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari prasarana dan sarana yang ada di kawasan wisata Labuan Cermin termasuk didalamnya aksesibilitas, amenitas, dan atraksi. Dari segi akses jalan dari Ibukota yaitu Tanjung Redeb ke Kecamatan Biduk-Biduk dalam kondisi rusak sehingga membutuhkan waktu perjalanan yang lebih lama. Fasilitas pendukung seperti akomodasi, dan restoran dari kapabilitasnya masih kurang. Sedangkan fasilitas umum yang ada di Labuan Cermin seperti ruang ganti yang ada hanya dua, dan satu dari ruangan tersebut dalam kondisi rusak. Tidak adanya petugas keamanan dalam mengawasi kegiatan wisata juga masih kurangnya pemandu wisata. Selain itu dari segi promosi, Labuan Cermin dari sekian wisata bahari yang ada di Kabupaten Berau belum cukup dikenal oleh wisatawan lokal maupun asing. Promosi yang dilakukan masih kurang sehingga informasi yang didapat masih sedikit. Hal ini berdampak pada kurangnya pengunjung untuk berwisata ke Labuan Cermin.

Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui bahwa masing-masing penelitian memiliki fokus yang berbeda-beda, namun sama-sama menyoroti peran instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terhadap masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu

tersebut, peneliti dapat mengambil pelajaran dan acuan dalam melakukan penelitian ini. Untuk lebih jelasnya, perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Relevan

No	Peneliti	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Hariati Adawiyah (2023)	Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan dalam Pembuatan Surat Pindah Datang	Peran Dinas sudah baik, dilihat dari indikator kemampuan selektif, sosialisasi, pengetahuan, kemahiran manajerial, dan pelaksanaan sendiri meskipun ada hambatan seperti kurangnya petugas dan jaringan internet	Sama-sama membahas peran dinas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik	Objek dan bidang kajian berbeda: Penelitian terdahulu pada Disdukcapil, sedangkan penelitian ini pada Dinas Perikanan
2	Nita Bonita (2016)	Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Meningkatkan	Peran dinas dalam meningkatkan kunjungan wisata masih kurang optimal	Sama-sama meneliti peran instansi pemerintah daerah dalam meningkatkan	Fokus penelitian berbeda: penelitian terdahulu pada

		an Kunjungan Wisatawan Labuan Cermin di Kabupaten Berau	karena sarana prasarana dan promosi yang belum memadai	n suatu sektor	pariwisata, sedangkan penelitian ini pada perikanan budidaya ikan patin
--	--	---	--	----------------	---

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Peran

a. Pengertian Peran

Teori peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “Peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Menurut Soerjono Soekanto (2017:221), mengemukakan definisi peran, yakni peran lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri, dan berbagai serangkaian suatu proses. Jadi tepatnya adalah seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu perannya.

Menurut Poedarminta (2015:571), peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa. Maksud dari tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan

seperangkat tingkah laku yang diharapkan dan dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat.

Sedangkan Biddle dan Thomas dalam Suhardono (2025:15) memandang peran sebagai pembawaan “lakon” seorang pelaku dalam sandiwara kehidupan sosial. Seperti halnya seorang aktor yang mengikuti script, arahan sutradara, bekerja sama dengan sesama pemain, serta menyesuaikan diri dengan reaksi penonton, demikian pula individu dalam kehidupan nyata menjalankan perilakunya sesuai norma, tuntutan sosial, dan aturan posisi sosial yang ia duduki.

Dari berbagai pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa peran adalah harapan dari masyarakat atau lingkungan terhadap individu atau lembaga agar menjalankan fungsinya sesuai kedudukannya. Dalam konteks penelitian ini, peran Dinas Perikanan adalah pelaksana fungsi, kewajiban, dan tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan, bimbingan, serta dukungan teknis kepada pelaku usaha budidaya ikan patin agar mampu meningkatkan usaha budidaya.

Sondang P. Siagian (2018:142-150) mengemukakan bahwa pemerintah, termasuk dinas teknis, memiliki peran penting dalam pembangunan sebagai:

1. Stabilisator, peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejala sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif, melalui pendidikan, pendekatan yang persuasif dan pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan.

2. Inovator, dalam memainkan peran selaku inovator pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Jadi prakondisi yang harus terpenuhi agar efektif memainkan peranannya pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi. Suatu pemerintahan yang tingkat keabsahannya rendah, misalnya “menang” dalam perebutan kekuasaan atau karena melalui pemilihan umum yang tidak jujur dan tidak adil, akan sulit menyodorkan inovasinya kepada masyarakat. Tiga hal yang mutlak mendapatkan perhatian serius adalah penerapan inovasi yang sifatnya konsepsional, inovasi sistem, prosedur dan metode kerja.
3. Modernisasi, melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan antara lain: penguasa ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi, sistem pendidikan nasional yang menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan sehingga berorientasi pada masa depan
4. Polopori, selaku pelopor pemerintah harus menjadi panutan (*role model*) bagi seluruh masyarakat. Pelopor dalam bentuk hal-hal positif seperti kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin, kepeloporan dalam kepedulian terhadap lingkungan, budaya dan sosial dan kepeloporan dalam berkorban demi kepentingan negara.
5. Pelaksana Sendiri, meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata, karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan negara, modal terbatas, kemampuan yang belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan arena konstitusional merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak biasa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah.

2. Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 33

Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas

Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara, dinas mempunyai peran

penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan sektor perikanan. Artinya, dinas ini menjadi pelaksana teknis yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pengembangan, serta pemberdayaan kegiatan perikanan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Untuk menjalankan tugas tersebut, Dinas Perikanan memiliki beberapa fungsi utama yaitu:

1. Merumuskan Kebijakan di bidang perikanan
2. Melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan
3. Melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan perikanan
4. Menyelenggarakan administrasi dinas serta;
5. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Secara struktural, Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri atas beberapa bidang yang memiliki tanggung jawab berbeda. Bidang-bidang tersebut antara lain Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap, Bidang Pengelolaan dan Pemasaran, Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya, Bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan, UPT BBI Lokal Banjarang. Masing-masing bidang mempunyai peran yang saling berkaitan, mulai dari pembinaan nelayan dan pelaku usaha, pengembangan sarana prasarana, pengendalian sumber daya ikan, hingga peningkatan kegiatan budidaya dan produksi perikanan.

3. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Peran Organisasi

Organisasi pemerintah seperti Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang berasal dari dalam organisasi (Internal) maupun dari luar organisasi (eksternal).

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah hal-hal yang berasal dari dalam organisasi dan dapat dikendalikan secara langsung. Faktor ini meliputi beberapa aspek berikut:

1. Sumber daya manusia (SDM) yaitu kualitas, kemampuan, dan motivasi pegawai dalam melaksanakan tugas. SDM yang kompeten akan meningkatkan kinerja organisasi.
2. Struktur organisasi, yang mengatur pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara proporsional agar koordinasi berjalan efektif.
3. Kepemimpinan, yaitu kemampuan pemimpin dalam mengarahkan dan menggerakkan bawahan untuk mencapai tujuan organisasi
4. Sarana dan prasarana, seperti peralatan kerja, fasilitas, dan dukungan teknologi yang menunjang pelaksanaan kegiatan.
5. Budaya Organisasi, mencakup nilai-nilai, kebiasaan, dan etos kerja yang berlaku di lingkungan organisasi.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar organisasi dan tidak sepenuhnya dapat dikendalikan, namun berpengaruh

terhadap peran dan kinerja organisasi. Faktor-faktor eksternal tersebut antara lain:

1. Lingkungan sosial dan ekonomi, yang mencakup kondisi masyarakat, tingkat pendidikan, dan pendapatan yang dapat memenuhi pelaksanaan program organisasi.
2. Kebijakan dan regulasi pemerintah, baik dari tingkat pusat maupun daerah, yang menjadi dasar hukum dalam melaksanakan tugas.
3. Perkembangan teknologi, yang menuntut organisasi untuk beradaptasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi dalam meningkatkan efektivitas pelayanan
4. Kondisi geografis dan alam, terutama bagi organisasi yang bergerak di sektor perikanan di mana faktor lingkungan perairan, cuaca, dan sumber daya air sangat berpengaruh terhadap kegiatan budidaya
5. Dukungan masyarakat dan kerja sama antar lembaga yang dapat memperkuat pelaksanaan program dan meningkatkan keberhasilan kegiatan organisasi

4. Konsep Perikanan dan Budidaya

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan serta lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, hingga pemasaran. Sofijanto (2021:7) menegaskan bahwa perikanan memiliki dua jenis, yaitu perikanan tangkap yang dilakukan langsung di perairan umum (laut,

sungai, danau) dan perikanan budidaya yang dilakukan pada lingkungan terkontrol untuk memelihara, membesarkan, hingga memanen ikan.

a. Pengertian Budidaya Perikanan

Budidaya perikanan adalah usaha memelihara, membesarkan, dan membiakkan organisme air seperti ikan, udang, kerang, dan tumbuhan air dalam lingkungan yang terkontrol untuk diambil manfaat dan hasilnya. Menurut Tholibah et al. (2023:2) perikanan budidaya merupakan serangkaian aktivitas yang dimulai dari persiapan fasilitas hingga proses panen dengan tujuan menghasilkan produk berkualitas tinggi. Sedangkan menurut Effendi dalam Rahayu (2025:3) budidaya perikanan adalah intervensi terencana dan dilakukan dengan sengaja dalam memproduksi organisme akuatik seperti ikan, udang, *moluska*, *echinodermata*, alga dan sebagainya untuk memperoleh profit dari kegiatan tersebut.

b. Jenis-jenis Budidaya Perikanan

Berdasarkan lingkungan tempat pemeliharaannya, budidaya perikanan dibedakan menjadi:

1. Budidaya air tawar dilakukan di kolam tanah, kolam beton, kolam terpal, maupun keramba jaring apung di sungai dan waduk. Contohnya ikan patin, nila, lele, dan gurami.
2. Budidaya air payau dilakukan di tambak yang memanfaatkan percampuran air laut dan air tawar. Komoditas utamanya udang windu, bandeng, dan kepiting.

3. Budidaya air laut di lakukan di laut menggunakan keramba jaring apung atau rakit. Komoditas yang dibudidayakan antara lain kerapu, kakap putih, dan karang-karangan.

c. Tahapan Budidaya Ikan

Proses budidaya ikan umumnya melalui beberapa tahapan penting
Yaitu sebagai berikut:

1. Persiapan lahan/kolam mencakup pengeringan, pengapuran, pemupukan, dan pengisian air untuk menciptakan kondisi yang sesuai bagi ikan.
2. Pemilihan bibit, bibit harus sehat, aktif berenang, dan berasal dari induk unggul agar memiliki pertumbuhan cepat serta tahan penyakit.
3. Penebaran bibit dilakukan dengan perhitungan kepadatan tebar yang sesuai agar ikan dapat tumbuh maksimal
4. Pemberian pakan dilakukan secara teratur dengan komposisi nutrisi seimbang.
5. Pengelolaan Kualitas air meliputi pemantauan pH, suhu, oksigen terlarut dan kebersihan air.
6. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menjaga sanitasi kolam, penggunaan obat ikan bila perlu, dan pemberian bibit vitamin
7. Pemanenan dilakukan setelah ikan mencapai ukuran konsumsi.
Tahap ini memerlukan teknik yang hati-hati agar ikan tidak stres atau rusak.

d. Tujuan dan Manfaat Budidaya

Budidaya perikanan memiliki tujuan utama untuk meningkatkan produksi ikan guna memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Budidaya ikan juga bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan, menciptakan lapangan kerja, menyediakan protein hewani yang murah, serta mendukung ketahanan pangan nasional. Selain itu, budidaya perikanan dapat mengurangi tekanan terhadap sumber daya ikan di alam yang jumlahnya semakin menurun akibat penangkapan berlebihan.

5. Konsep Ikan Patin

Ikan patin (*Pangasius sp*) merupakan salah satu komoditas ikan air tawar yang banyak dikembangkan di Indonesia karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Patin dikenal sebagai ikan dengan rasa daging lezat, teksturnya lembut, serta kandungan gizi yang baik. Keunggulan lain dari ikan patin adalah kemampuannya beradaptasi dengan hasil berbagai jenis perairan. Suparno (2019: 8-9) “Ikan patin memiliki tubuh putih keperak-perakan dan punggung kebiru-biruan, dalam usia enam bulan ikan patin bisa mencapai panjang 35-40 cm. Ikan patin mudah dibudidayakan dalam berbagai media pemeliharaan yang berbeda, misalnya kolam, keramba, jala apung, dan lain-lain”

Pertumbuhan ikan patin yang relatif cepat hanya dalam kurun waktu 6-8 bulan, ikan patin sudah bisa dipanen dalam ukuran konsumsi. Hal ini menjadikan usaha budidaya patin menguntungkan karena siklus modal berputar lebih singkat. Dari sisi pasar, patin memiliki prospek

yang cerah. Kementerian Kelautan dan Perikanan (2018) mencatat bahwa permintaan patin terus meningkat baik di pasar domestik maupun internasional. Patin bahkan menjadi salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia, khususnya ke negara-negara Asia Tenggara. Dengan dukungan pemerintah daerah, potensi budidaya patin dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat desa.

6. Budidaya Ikan Patin dengan Media Kolam

Budidaya ikan patin dengan media kolam merupakan teknik yang paling banyak digunakan masyarakat. Kolam memberikan lingkungan yang lebih terkontrol dibandingkan dengan keramba atau tambak. Kolam juga memungkinkan pembudidaya untuk lebih fleksibel dalam mengatur kepadatan tebar, kualitas air merupakan faktor kunci dalam keberhasilan budidaya patin. Kualitas air yang baik akan mempercepat pertumbuhan dan menekan angka kematian.

Dinas Perikanan memiliki peran strategis dalam mendampingi masyarakat agar mampu mengelola kolam dengan baik. Dukungan dapat berupa penyuluhan, pelatihan teknis, bantuan bibit unggul, serta akses terhadap pakan buatan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mengandalkan pengalaman tradisional, tetapi juga menerapkan teknologi budidaya yang lebih modern.

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Serta Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2014 tentang

Penetapan Kecamatan Haur Gading sebagai kawasan minapolitan, maka jelas bahwa pengembangan perikanan budidaya merupakan bagian penting dari pembangunan daerah. Sektor ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, dan menjadi salah satu penggerak ekonomi lokal.

Mengingat besarnya potensi budidaya ikan patin di Desa Loksuga, Kecamatan Haur Gading, Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada Peran Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam meningkatkan usaha budidaya ikan patin dengan media kolam. Peran pemerintah daerah, khususnya Dinas Perikanan sangat diperlukan dalam memberikan bimbingan, dukungan sarana prasarana, serta inovasi teknologi budidaya agar masyarakat pembudidaya dapat memanfaatkan potensi yang ada secara maksimal.

Menurut Sondang P. Siagian (2018:142-150) pemerintah memiliki lima peran penting dalam proses pembangunan, yaitu:

1. Stabilisator, peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif, melalui pendidikan, pendekatan yang persuasif dan pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan.
2. Inovator, dalam memainkan peran selaku inovator pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Jadi prakondisi yang harus terpenuhi agar efektif memainkan peranannya pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi. Suatu pemerintahan yang tingkat keabsahannya rendah, misalnya “menang” dalam perebutan kekuasaan atau karena melalui pemilihan umum yang tidak jujur dan tidak adil, akan sulit menyodorkan inovasinya kepada masyarakat. Tiga hal yang mutlak mendapatkan perhatian serius adalah penerapan inovasi yang sifatnya konseptual, inovasi sistem, prosedur dan metode kerja.

3. Modernisasi, melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan antara lain: penguasa ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi, sistem pendidikan nasional yang menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan sehingga berorientasi pada masa depan .
4. Polopor, selaku pelopor pemerintah harus menjadi panutan (*role model*) bagi seluruh masyarakat. Pelopor dalam bentuk hal-hal positif seperti kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin, kepeloporan dalam kepedulian terhadap lingkungan, budaya dan sosial dan kepeloporan dalam berkorban demi kepentingan negara.
5. Pelaksana Sendiri, meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata, karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan negara, modal terbatas, kemampuan yang belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan arena konstitusional merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak biasa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

